

Penguatan Kapasitas, Tata Kelola, dan Sumber Daya *Financial Stability Board (FSB)* dan Posisi Indonesia di G20

Nanang Zainal Arifin¹

Pendahuluan

Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara maju yang tergabung dalam *the Group of Seven (G7)* seperti Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada mendirikan *Financial Stability Forum (FSF)* pada tanggal 20 Februari 1999. Tujuan utama pendirian FSF adalah sebagai forum koordinasi global dalam mempromosikan regulasi sektor keuangan yang efektif, pengawasan kebijakan keuangan, dan stabilitas sistem keuangan internasional (Draghi, 2009). Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2009, kelompok negara maju anggota G7 menyadari bahwa upaya menciptakan stabilitas perekonomian dan keuangan global tidak dapat hanya dilakukan oleh negara anggota G7 semata, namun negara emerging dan negara berkembang juga mempunyai peranan yang cukup signifikan dan nyata dan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan global.

Menindaklanjuti dinamika yang berkembang, pada pertemuan KTT G20 di London tanggal 2 April 2009, para pemimpin negara G20 telah memberikan mandat untuk mendirikan “*Financial Stability Board (FSB)*” yang memiliki basis kelembagaan dan kapasitas yang lebih kuat dibandingkan dengan FSF, serta bertujuan untuk memperkuat stabilitas keuangan global, termasuk menjaga stabilitas keuangan di kawasan dan di *domestic markets*. Perubahan ini membawa konsekuensi tugas dan tanggung jawab FSB menjadi lebih berat dan kompleks ditambah dengan adanya permintaan pekerjaan yang semakin meningkat. Lebih jauh lagi, struktur keanggotaan FSB telah diperluas tidak hanya beranggotakan negara-negara maju, akan tetapi juga negara emerging dan negara berkembang dan organisasi internasional. Dengan demikian, reformasi proses internal yang dilakukan oleh FSB merupakan suatu keharusan agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi mandat yang diterimanya dari G20.

Sebagai organisasi internasional yang mempunyai tugas dalam penyusunan standar regulasi dan pengawasan global, FSB masih mempunyai beberapa kelemahan yang perlu dibenahi. Kelemahan yang paling terlihat adalah yang terkait dengan kapasitas, tata kelola dan sumber daya

¹ Penulis bekerja di Pusat Kebijakan Pembiayaan, Perubahan Iklim, dan Multilateral, Kementerian Keuangan.
Alamat email: nzarifin@fiskal.depkeu.go.id

yang dimilikinya. Selain itu, struktur keanggotaannya juga belum mencerminkan keseimbangan yang adil, baik secara geografis maupun fungsi kelembagaannya. Kelemahan yang ada ini akan mempengaruhi *legitimacy* FSB dan dapat menghambat upaya dalam memenuhi mandatnya yaitu ikut berperan aktif dalam menciptakan stabilitas keuangan global dan mencegah terjadinya krisis di masa yang akan datang. Sebagai langkah antisipasi, pada pertemuan KTT G20 di Seoul tahun 2010 para pemimpin negara G20 telah meminta FSB menyampaikan proposal mengenai reformasi proses internalnya (G20, 2010).

Fokus Paper

Setelah mendapatkan mandat yang lebih luas dari G20, FSB diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan kestabilan sektor keuangan global dan mencegah terjadinya krisis serupa di masa yang akan datang. Untuk dapat memenuhi tujuan ini, reformasi proses internal yang telah dilakukan oleh FSB perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pembahasan di dalam paper ini akan difokuskan kepada proposal reformasi FSB yang dilakukan melalui penguatan kapasitas, tata kelola dan sumber dayanya, dan diskusi yang berkembang di dalam pertemuan-pertemuan G20.

Sebagai organisasi internasional yang mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan global, reformasi dalam proses internal FSB sudah menjadi keharusan. Hal ini ditujukan agar FSB dapat lebih mudah dalam mengemban tugas dan mandat yang diterimanya. Beberapa hal yang dipandang sebagai kelemahan FSB, khususnya yang menyangkut kapasitas, tata kelola dan sumber daya, antara lain struktur keanggotaannya yang belum mencerminkan keseimbangan yang adil, sumber pendanaan organisasi yang belum otonom, dan terbatasnya jumlah komite yang ada sehingga berpengaruh dalam kapasitasnya untuk menyelesaikan tugasnya yang semakin berat dan kompleks.

Struktur Organisasi FSB

Sesuai dengan *FSB Charter*, struktur organisasi FSB terdiri dari: (a) *Plenary* atau rapat pleno; (b) *Steering committee* atau komite pengarah; (c) *Chairperson*/ketua FSB; dan (d) Sekretariat.

- a. *Plenary* atau disebut juga dengan rapat pleno (rapat lengkap semua anggota) merupakan unit pengambil keputusan di FSB yang dilakukan secara konsensus. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Plenary yaitu menetapkan program kerja, mengadopsi laporan, prinsip kerja,

pedoman dan rekomendasi, memutuskan keanggotaan suatu negara, menunjuk ketua FSB dan mengamandemen *FSB Charter* (p. 3)

- b. *Steering committee* (SC) atau komite pengarah bertanggung jawab dalam memberikan pedoman dalam setiap pelaksanaan rapat pleno. Keanggotaannya diusulkan oleh Ketua FSB dan diputuskan dalam rapat pleno. Komposisi anggota komite pengarah diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai efektivitas penyelesaian pekerjaan FSB dan mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan setiap negara anggota baik menurut letak geografis maupun fungsi kelembagaan. Keanggotaan komite pengarah akan ditinjau ulang secara periodik. Pertemuan rutin komite pengarah paling sedikit dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun. Tugas komite pengarah, diantaranya adalah memonitor dan memberi pedoman atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan, menjaga koordinasi antar kelompok kerja, melakukan *joint strategic reviews*, dan menyelesaikan pekerjaan yang penting bagi FSB untuk memenuhi mandatnya (p. 5).
- c. Ketua FSB ditunjuk oleh anggota dalam rapat pleno untuk masa kerja selama 3 tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa periode. Ketua FSB memimpin setiap rapat pleno dan pertemuan komite pengarah, dan juga mengawasi kerja sekretariat. Ketua juga menjadi juru bicara dan mewakili FSB pada setiap kegiatan eksternal (p.6).
- d. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dalam rapat pleno atas usulan Ketua FSB. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua FSB dan melaksanakan tugas atas instruksi Ketua. Dalam mengangkat staf kesekretariatan, Sekretaris Jenderal harus mempertimbangkan komposisi yang adil bagi setiap anggota dengan memperhatikan letak geografis dan fungsi kelembagaan yang ada di setiap negara anggota. Tugas utama sekretariat adalah mendukung kegiatan FSB, memfasilitasi kerja sama antar anggota, dan antara FSB dan institusi lainnya, dan mengelola masalah keuangan, logistik, dan sumber daya manusia yang diperuntukan bagi FSB. Lokasi kantor FSB berada pada Kantor *Bank for International Settlement (BIS)* yang berlokasi di kota Basel, Swiss (p. 6).

Keanggotaan FSB

Sesuai dengan database FSB pada tahun 2012, FSB mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut: (1) 24 negara yang merupakan wakil dari negara maju, negara BRIC dan negara berkembang; (2) wakil dari organisasi internasional seperti: *Bank for International Settlements (BIS)*, *European Central Bank (ECB)*, *European Commission (EC)*, *International Monetary Fund*

(IMF), the World Bank, dan Organisation for Economic Coordination and Development (OECD); dan (3) wakil dari beberapa organisasi penyusun standar regulasi internasional, seperti: *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)*, *International Association of Insurance Supervisors (IAIS)*, *International Accounting Standards Board (IASB)*, dan *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* (Website FSB, 2012).

Keanggotaan pada FSB Plenary

Sebagaimana telah diuraikan dalam struktur organisasi FSB di atas, peranan *plenary* atau rapat pleno sangat penting dan strategis karena di dalam rapat pleno inilah semua keputusan penting akan dihasilkan oleh FSB. Dengan demikian, negara anggota yang mempunyai wakilnya di *plenary* akan terlibat secara aktif dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja FSB ke depan. Apalagi jika satu negara memiliki 3 kursi di *plenary* akan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di FSB.

Tabel 1: Susunan keanggotaan pada FSB Plenary

No.	Negara	Bank Sentral	Kementerian Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah Anggota
1.	Argentina	✓			1
2.	Australia	✓	✓		2
3.	Brazil	✓	✓	✓	3
4.	Canada	✓	✓	✓	3
5.	China	✓	✓	✓	3
6.	France	✓	✓	✓	3
7.	Germany	✓	✓	✓	3
8.	Hongkong SAR			✓	1
9.	India	✓	✓	✓	3
10.	Indonesia	✓			1
11.	Italy	✓	✓	✓	3
12.	Japan	✓	✓	✓	3
13.	Mexico	✓	✓		2
14.	Netherlands	✓	✓		2
15.	Korea	✓		✓	2
16.	Russia	✓	✓	✓	3
17.	Saudi Arabia			✓	1
18.	Singapore			✓	1
19.	South Africa		✓		1
20.	Spain	✓	✓		2
21.	Switzerland	✓	✓		2
22.	Turkey	✓			1
23.	UK	✓	✓	✓	3
24.	USA	✓	✓	✓	3
25.	International Organizations				6
26.	International standard setting bodies				7

Sumber: Website FSB tahun 2012 (data diolah penulis)

Tabel 1 menceritakan mengenai struktur keanggotaan FSB pada rapat pleno (*plenary*). Struktur keanggotaan dalam FSB ini dapat dibagi berdasarkan letak geografis dan berdasarkan fungsi kelembagaannya. Berdasarkan letak geografisnya, negara-negara maju masih mendominasi keanggotaan di *FSB Plenary*. Tabel 1 secara rinci menjelaskan bahwa negara-negara maju yang sebagian besar terletak di wilayah Eropa, Amerika, Australia dan Asia (Jepang) semuanya berjumlah 12 negara. Negara BRIC (Brasil, Russia, India dan China) yang mewakili wilayah Amerika Latin dan Asia Timur berjumlah 4 negara. Sedangkan negara berkembang yang terletak di wilayah Asia Tenggara, Amerika bagian Selatan, dan Afrika bagian Selatan berjumlah 8 negara.

Berdasarkan fungsi kelembagaannya, kepemilikan kursi setiap negara anggota pada *FSB Plenary* adalah berbeda-beda antara 1 sampai dengan 3 kursi yang masing-masing diperuntukkan bagi Bank Sentral, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan tabel 1 di atas, negara maju dan negara BRIC rata-rata memiliki 3 kursi di *FSB Plenary*, sehingga mendominasi total kepemilikan kursi di *Plenary*. Adapun, rata-rata kepemilikan kursi negara berkembang antara 1 dan 2 kursi. sebagai contoh, Indonesia hanya memiliki 1 (satu) kursi di *FSB Plenary* yang diwakili oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan keanggotaan di *FSB Plenary*, Indonesia pernah menyampaikan proposal untuk meminta tambahan keanggotaan bagi wakil dari Kementerian Keuangan di *FSB Plenary*. Proposal ini disampaikan kepada Ketua FSB melalui surat bersama yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (Surat bersama, 2011). Alasan kuat yang mendasari Indonesia menyampaikan proposal tersebut adalah:

- Cakupan program kerja FSB meliputi penyusunan *regulatory* global tidak hanya di sektor perbankan, namun juga sektor non-bank seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Untuk kebijakan perbankan, kehadiran Bank Indonesia di FSB adalah sudah tepat. Namun, untuk kebijakan yang menyangkut asuransi, pasar modal dan lembaga pembiayaan, hal ini merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
- Kehadiran wakil Kementerian Keuangan di FSB, tidak hanya dapat memperluas cakupan *regulatory* yang akan dibuat, namun juga dapat mempercepat proses pembahasan di DPR khususnya yang menyangkut kebijakan sektor keuangan dan implementasinya di Indonesia.

Setelah melalui proses pembahasan di komite pengarah dan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan ke *plenary*, rapat pleno FSB akhirnya memutuskan belum dapat menyetujui proposal Indonesia, dengan alasan tambahan kursi yang ada akan diperuntukkan bagi

wakil dari Afrika dan Timur Tengah yang belum mempunyai wakilnya di *FSB Plenary*. Namun, apabila melihat susunan keanggotaan di *FSB Plenary*, bisa saja negara-negara maju mengurangi dominasi kepemilikan kursinya dan diberikan kepada wakil dari negara emerging dan negara berkembang agar struktur keanggotaan di *FSB* lebih adil dan berimbang.

Keanggotaan pada Komite Pengarah (*Steering Committee*)

Komite Pengarah (*Steering committee*) merupakan unit strategis di *FSB* dalam membantu pelaksanaan tugas Ketua *FSB*. Susunan keanggotaan komite pengarah diusulkan oleh Ketua *FSB*, dan komite ini berperan besar dalam memberi pedoman dan arahan bagi operasional kegiatan *FSB*, selain memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring atas pekerjaan yang sedang dijalankan dan implementasinya. Setiap usulan dan tugas yang terkait dengan proses internal *FSB* akan dibahas terlebih dahulu di dalam komite pengarah, sebelum nantinya diputuskan di dalam rapat pleno.

Tabel 2. Susunan Anggota Komite Pengarah (*Steering Committee*) *FSB* (7 Feb 2012)

No.	Nama	Institusi	Negara
1.	Mark Carney	Bank of Canada	Canada
2.	Glenn Stevens	Reserve Bank of Australia	Australia
3.	Alexandre Antonio T	Banco Central do Brasil	Brasil
4.	Julie Dickson	Financial Institutions	Canada
5.	Zhou Xiaochuan	The People's Bank of China	China
6.	Ramon Fernandez	Ministry of Economy, Finance and Industry	France
7.	Christian Noyer	Banque de France	France
8.	Thomas Steffen	Ministry of Finance	Germany
9.	Jens Weidmann	Deutsche Bundesbank	Germany
10.	K C Chakrabarty	Reserve Bank of India	India
11.	Ignazio Visco	Banca d'Italia	Italia
12.	Masamichi Kono	Financial Services Agency	Japan
13.	Takehiko Nakao	Ministry of Finance	Japan
14.	Kyungho Choo	Financial Services Commission	Korea
15.	Agustin Carstens Carstens	Banco de Mexico	Mexico
16.	Gerardo Rodriguez R	Ministry of Finance	Mexico
17.	Klaas Knot	De Nederlandshe Bank	Netherlands
18.	Sergey Storchak	Ministry of Finance	Russia
19.	Alexey Ulyukhaev	Central Bank of the Russian Fed.	Russia
20.	Fahad Almubarak	Saudi Arabian Monetary Agency	Saudi Arabia
21.	Ravi Menon	The Monetary Authority of Singapore	Singapore
22.	Ismail Momoniat	National Treasury	South Africa
23.	Miguel Angel Fernandez	Bank of Spain	Spain
24.	Thomas Jordan	Swiss National Bank	Swiss
25.	Tom Scholar	HM Treasury	UK
26.	Adair Turner	Financial Services Authority	UK
27.	Lael Brainard	Department of the Treasury	USA
28.	Mary Schapiro	Securities and Exchange Commission	USA
29.	Daniel K Tarullo	Federal Reserve System	USA
30.	Jose Vinals	Monetary and Capital Markets Dept	IMF
31.	Jaime Caruana	General Manager	BIS
32.	Vitor Constancio	European Central Bank	ECB

33.	Jonathan Faull	Internal Market and Services	EC
34.	Stefan Ingves	Chairman, Basel Committee on Banking Supervision	BCBS
35.	Peter Braumuller	Chairman, International Association of Insurance Supervisors	IAIS (Austria)
36.	Hans Hoogervorst	Chairman, International Accounting Standards Board	IASB
37.	William C Dudley	Chairman, Global Financial System	New York
38.	To be determined	Chairman, Committee on Payment and Settlement Systems	
39.	Tiff Macklem	Chairman, FSB Standing Committee on Standards Implementation	Canada
40.	Paul Tucker	Chairman, FSB Resolution Steering	UK

Sumber: website FSB tahun 2012 (data diolah penulis)

Tabel 2 di atas menggambarkan kepemilikan kursi negara anggota di komite pengarah FSB. Dapat dilihat bahwa negara-negara maju masih mendominasi kepemilikan kursi di komite pengarah, sedangkan negara berkembang keterwakilannya masih sangat kurang. Dari total 29 kursi yang telah dialokasikan untuk 20 negara anggota, total kepemilikan kursi negara maju adalah 18 kursi dengan rincian: Amerika Serikat (3 kursi), Canada (2 kursi), Jepang (2 kursi), Perancis (2 kursi), Jerman (2 kursi), Inggris (2 kursi), Australia (1 kursi), Italia (1 kursi), Belanda (1 kursi), Spanyol (1 kursi), dan Swiss (1 kursi). Negara BRIC memiliki 5 kursi dengan rincian: Brasil (1 kursi), Russia (2 kursi), India (1 kursi), dan China (1 kursi). Sedangkan total kepemilikan kursi negara berkembang adalah 6 kursi dengan rincian: Mexico (2 kursi), Korea (1 kursi), Singapore (1 kursi), Saudi Arabia (1 kursi), dan Afrika Selatan (1 kursi). Dengan demikian, keterwakilan negara berkembang di komite pengarah masih sangat terbatas apabila melihat jumlah negara dan kursi yang dimilikinya. Hal ini menjadi lebih ironis apabila mempertimbangkan bahwa negara berkembang memiliki total jumlah negara yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang luas yang tersebar di Asia, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Latin.

Dengan menganalisis kedua tabel di atas, kiranya tergambar bahwa susunan keanggotaan FSB, baik di *plenary* maupun di komite pengarah masih belum berimbang antara negara maju dan negara berkembang, baik dari segi keterwakilan letak geografis maupun sesuai dengan fungsi kelembagaannya. Dominasi negara maju masih terlihat jelas di kedua posisi tersebut. Sedangkan negara berkembang yang jumlah negaranya lebih banyak dan dengan cakupan wilayahnya sangat luas, keterwakilannya masih kurang. Hal ini memunculkan anggapan bahwa negara-negara maju mempunyai kepentingan yang kuat dalam penataan regulasi keuangan global yang sedang berjalan saat ini. Sebagai usulan perbaikan di masa mendatang, reformasi di FSB perlu diarahkan agar tercapai susunan keanggotaan yang lebih berimbang, dengan menambah keterwakilan dan kepemilikan kursi bagi negara berkembang. Susunan keanggotaan yang berimbang ini cukup

penting agar FSB mendapatkan *legitimacy* dunia internasional atas tugas dan peran yang dimilikinya.

Program Kerja FSB

Pertemuan G20 di Washington, DC, di London dan Pittsburgh pada tahun 2008 dan 2009 merupakan pemicu mulai dibicarakannya program kerja untuk mereformasi sektor keuangan global pada pertemuan G20. FSB telah menyampaikan beberapa program kerja dengan tujuan membangun sistem keuangan yang lebih kuat dan *less procyclical*, yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan ekonomi di negara anggota. Indonesia, sebagai salah satu anggota G20 yang juga menjadi anggota pada *Financial Stability Board (FSB)* mendukung program kerja FSB sebagai berikut.

- Penerapan standar baru mengenai permodalan dan likuiditas bank (*Basel III*)
- Kerangka untuk mengatasi resiko *moral hazard* yang ditimbulkan oleh SIFIs (*Systemically Importance Financial Institutions*)
- Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan
- Perluasan perimeter peraturan dengan menyertakan isu *OTC derivatives markets, hedge funds dan credit rating agencies*
- Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional
- Penguatan standard akuntansi
- Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial
- Langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur pasar
- Pengaturan Lembaga Pemeringkat
- Pendirian Supervisory Colleges
- Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasar prudensial yang lebih kuat
- Pengaturan sistem pengawasan yang menyeluruh baik di tingkat nasional, regional maupun internasional
- Alat-alat pengawasan untuk meningkatkan standar tata kelola, manajemen resiko dan perlindungan modal pada lembaga keuangan.

Selanjutnya, FSB akan memantau konsistensi atas pelaksanaan program reformasi tersebut, diantaranya melalui mekanisme *peer reviews* dan penyampaian laporan secara rutin kepada G20.

Agenda Reformasi FSB di G20 dan Perkembangannya

KTT G20 di Seoul, Korea Selatan tahun 2010

Sebagai tindak lanjut dari program kerja FSB yang dihasilkan pada pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya, pada KTT G20 di Seoul, Korea Selatan tahun 2010, para pemimpin negara G20 telah meminta FSB untuk menyampaikan proposal mengenai penguatan kapasitas, sumber daya dan tata kelolanya. Penguatan proses internal FSB ini cukup mendesak mengingat cakupan kerja FSB yang semakin luas dan kompleks, serta banyaknya *regulatory issues* yang harus dibahas di FSB.

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 bulan April 2011

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada bulan April 2011, FSB telah menyampaikan proposal awal mengenai upaya penguatan kapasitas, tata kelola dan sumber dayanya, yang berisikan hal-hal sebagai berikut (FSB, 2011).

Penguatan Tata Kelola (*Governance*) FSB yang dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu:

- a. Memperkuat peran rapat pleno (*FSB Plenary*). Rapat pleno merupakan institusi/lembaga yang sangat penting dalam struktur FSB karena institusi ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengambil keputusan di FSB.
 - Tantangan yang dihadapi:

Sejak FSF berubah menjadi FSB, scope dan kecepatan kerja FSB telah diperluas. Hal ini berdampak kepada jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh komite pengarah dan komite tetap menjadi meningkat, demikian juga dengan jumlah proposal yang disampaikan dalam rapat pleno untuk mendapat persetujuan meningkat. Secara langsung hal ini akan berakibat kepada pembahasan di dalam rapat pleno menjadi kurang intensif karena terbatasnya waktu pembahasan untuk membahas proposal yang jumlahnya semakin meningkat.
 - Solusi yang ditawarkan:
 - Meningkatkan arus informasi dan akses yang lebih cepat dan lengkap atas agenda dan dokumen rapat komite pengarah dan tetap. Semua dokumen harus sudah didistribusikan jauh sebelum tanggal pelaksanaan rapat agar setiap anggota komite mempunyai waktu cukup untuk melakukan *review*. Dimungkinkannya pembuatan keputusan secara tertulis atau melalui komunikasi per telepon, sehingga rapat pleno hanya difokuskan untuk membahas isu-isu substantif dengan lebih intensif.
 - Mengharuskan agar mandat dari kelompok kerja dapat disetujui oleh rapat pleno. Hal ini akan memastikan semua anggota FSB mempunyai kesempatan untuk menyampaikan

masuk sebelum pekerjaan substantif dimulai. Persetujuan mandat dapat disampaikan melalui tertulis, apabila jadwal rapat pleno berikutnya masih jauh.

- Memperpanjang waktu rapat pleno selama 1.5 sampai 2 hari ketika memiliki agenda pembahasan yang cukup banyak.

b. Memperkuat perwakilan (*representativeness*) pada komite-komite di FSB

Sesuai dengan *FSB Charter*, komite pengarah dan komite tetap merupakan bagian dari struktur internal FSB. Semua anggota pada kedua komite tersebut akan terlibat pada beberapa kegiatan, namun tidak ada anggota yang dapat terlibat pada semua kegiatan. Baik komite pengarah maupun komite tetap menunjukkan tingkat kehadiran yang tinggi dalam setiap rapat, hal ini menjadi kunci efektivitas pelaksanaan tugas mereka. *FSB Charter* mensyaratkan bahwa perwakilan di komite pengarah harus seimbang menurut wilayah maupun fungsi kelembagaannya. Namun, mengingat luasnya mandat yang diberikan kepada komite pengarah, susunan komite pengarah saat ini tidak memenuhi persyaratan tersebut. Tidak ada perwakilan dari wilayah Timur Tengah dan Afrika, serta *national treasuries* di dalam komite pengarah. Oleh karena itu perlu disusun kembali komposisi keanggotaan di dalam komite pengarah dengan mempertimbangkan ketentuan yang baru, dan menambahkan mengenai pengaturan mengenai pengawasan sistemik, serta menghindari pemilihan ketua FSB yang berasal dari lembaga internasional yang memiliki jabatan rangkap.

Penguatan inklusifitas dan akuntabilitas Publik (*public inclusiveness and accountability*) yang dapat dilakukan melalui:

a. Adopsi model tata kelola yang lebih mewakili untuk FSB

Saat ini FSB memiliki anggota dari 24 negara, sedangkan *the regional consultative groups initiative* yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat memiliki wakil dari 70 negara yang bukan merupakan anggota FSB. Sehingga secara keseluruhan, FSB memiliki jaringan di 94 negara di seluruh dunia yang akan memperkuat legitimasi dan peranannya dalam membentuk penerapan standar keuangan internasional dalam skala yang lebih luas. Namun, konsisten dengan visi jangka panjangnya, FSB perlu memperluas keanggotaannya untuk menjadikannya organisasi yang benar-benar mendunia.

b. Keterbukaan dan akuntabilitas

FSB perlu menyempurnakan masalah keterbukaan dan akuntabilitas. Langkah-langkah khusus sedang dilakukan, sebagai contoh pada *website FSB* akan disediakan ruang untuk negara anggota dalam memberikan respon mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan berbagai rekomendasi kebijakan di dalam negeri. Hal ini dapat mendorong transparansi dalam

hal publikasi pencapaian komitmen oleh negara anggota. Di masa yang akan datang, setiap negara anggota dapat menyampaikan *key policy notes* untuk konsumsi publik sebelum diadopsi oleh FSB. Masalah keterbukaan lain yang perlu diselesaikan adalah mengenai komposisi anggota dari berbagai komite di dalam FSB, belum dipublikasikan melalui website FSB.

Mengenai isu akuntabilitas, moto FSB adalah “memimpin dengan memberi teladan” (*leading by example*). FSB telah berkomitmen menerapkan standar internasional dan kebijakan yang telah disetujui oleh internal FSB, merupakan contoh bagi negara konstituennya. Namun, mekanisme di FSB mengenai pemantauan dan penilaian komitmen negara-negara anggota perlu disempurnakan. Sejalan dengan hal ini, perlu dibentuk mekanisme formal untuk memastikan tercapainya evaluasi yang objektif apakah negara anggota benar-benar telah memenuhi komitmennya.

Penguatan Proses Internal FSB

Atribut yang diharapkan dari FSB adalah proses internal yang tidak rumit, dengan tetap mengacu kepada kecepatan dan fleksibilitas. Dengan adanya perluasan mandat, meningkatnya agenda kerja, dan berbagai laporan yang saling terkait, mendorong perlunya disusun prosedur dan proses yang sistematis yang meliputi struktur internal FSB. Perbaikan akan hal-hal tersebut dalam waktu dekat akan meningkatkan efisiensi dan transparansi atas pelaksanaan fungsi-fungsi FSB, sebagai berikut:

a. Penguatan arus informasi kepada negara anggota

Untuk memperbaiki arus informasi kepada seluruh anggota rapat pleno, diusulkan agar dokumen untuk rapat komite-komite di FSB didistribusikan melalui website FSB. Hal ini memungkinkan para anggota untuk mengikuti perkembangan dan memberikan masukan atas masalah-masalah yang dibahas dalam komite-komite tersebut.

b. Penjadwalan pertemuan secara rutin

Rapat *plenary* yang terdiri dari rapat komite pengarah dan komite tetap, perlu di jadwalkan secara rutin setiap tahun dan dapat ditetapkan pada awal tahun, serta mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- Jangka waktu antara rapat komite pengarah dan rapat pleno minimal 10 hari kerja.
- Jangka waktu antara rapat pleno dan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau pertemuan *G20 Leaders* minimal 10 hari kerja.

c. Memperbaiki penyampaian dokumen pertemuan

Dokumen untuk pertemuan-pertemuan FSB (rapat pleno, komite pengarah, komite tetap dan rapat kelompok kerja) sudah diterima semua anggota 5 hari sebelum hari H.

d. Daftar anggota

Mandat dan susunan semua anggota komite dan kelompok kerja harus dapat diakses di website FSB, yang khusus diperuntukan untuk anggota. Akan dibentuk daftar kontak untuk setiap sekretaris anggota FSB yang terdiri dari nama, jabatan, pekerjaan dan nomor telp/email yang dapat dihubungi.

Isu Kapasitas dan Sumber Daya FSB

- a. Isu kapasitas di FSB terkait dengan konsistensi pelaksanaan pemantauan terhadap standar keuangan internasional yang harus dilaksanakan oleh FSB. Saat ini FSB memiliki 2 mekanisme untuk menjamin konsistensi atas penerapan standar keuangan internasional, yaitu melalui *peer reviews* dan laporan evaluasi mengenai kerjasama internasional dan inisiatif pertukaran informasi kepada G20. Terdapat pandangan bahwa untuk hal-hal khusus seperti praktek-praktek kompensasi yang terjadi, pemantauan dan evaluasi atas praktek ini harus dilakukan secara rutin dan permanen oleh FSB, dan juga harus dilakukan oleh staf ahli yang direkrut secara khusus oleh FSB.
- b. Isu sumber daya FSB (FSB resources) terkait dengan perspektif jangka panjang mengenai kemandirian pendanaan bagi FSB. Saat ini, dalam melakukan pekerjaannya, FSB belum mempunyai kapasitas dan sumber daya sendiri atau dengan kata lain FSB masih belum independen dalam bekerja. Hal ini karena selama ini kebutuhan pendanaan FSB sebagian besar dipenuhi melalui anggaran *Bank for International Settlement (BIS)*. Hal ini berdampak pada kapasitas perekrutan pegawai sekretariat FSB bergantung kepada anggaran BIS. Namun demikian, sebaiknya pedoman untuk perekrutan pegawai diputuskan oleh staf FSB sendiri.
- c. Kebutuhan staf FSB cukup mendesak. Sekretariat FSB jumlahnya kecil dibandingkan dengan bobot dan luasnya tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Untuk menjaga kualitas pekerjaan yang sudah baik dan dalam rangka mengantisipasi tambahan tugas yang terus meningkat, perlu dilakukan penambahan staf FSB.

Isu penguatan proses internal FSB ini memerlukan pendalaman dan langkah yang terstruktur agar dapat diimplementasikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, proposal FSB ini akan dibahas dan disahkan oleh para pemimpin negara G20 pada saat pertemuan KTT G20 di Cannes, Perancis pada bulan November 2011.

KTT G-20 di Cannes, Perancis tahun 2011

Pada KTT Cannes, Perancis pada tanggal 4 November 2011, para pemimpin negara G20 setuju untuk memperkuat kapasitas, tata kelola dan sumber daya FSB melalui upaya:

- a. Menjadikan FSB sebagai “*Enduring organizational footing*” yang memiliki badan hukum tetap, tata kelola yang kuat, dan lebih otonom dalam pendanaan organisasinya serta memiliki kapasitas yang meningkat agar dapat mengkoordinasikan pengembangan dan penerapan kebijakan regulasi keuangan global, dengan tidak lupa menjaga hubungan baik dengan BIS yang sudah terjalin selama ini.
- b. Menetapkan kembali komposisi keanggotaan pada komite pengarah (*the steering committee*).
- c. Memperkuat koordinasi dengan organisasi *standard setting bodies* ((SSBs) lainnya dalam hal pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan.

Selanjutnya dalam rangka untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya, FSB akan meminta endorsement dari pemimpin negara G20 agar mereka diijinkan untuk memiliki *legal entity* dengan menjadi Asosiasi dengan mengadopsi hukum Swiss. Meski bentuk asosiasi merupakan opsi yang paling mungkin bagi FSB, adopsi hukum Swiss perlu mendapat kajian lebih lanjut dari yurisdiksi anggota FSB agar tidak merugikan keanggotaannya. Selain itu, FSB juga perlu memperluas dan memformalkan jangkauan kegiatannya di luar keanggotaan G20, misalnya melalui kegiatan “*Regional Consultative Group*” yang sudah berjalan sebagai salah satu mekanisme *outreach FSB*.

Di sisi lain, mengingat anggaran FSB masih bergantung kepada anggaran BIS, ke depan FSB akan meminta anggotanya untuk membayar iuran sebagai upaya untuk memperkuat sumber daya yang ada saat ini. Terkait hal ini, dalam jangka panjang Indonesia perlu memperjuangkan untuk mendapatkan tambahan 2 (dua) kursi di *plenary* dan 3 (tiga) kursi di *FSB Asian Regional Consultative Group*. Upaya ini perlu dilakukan antara lain melalui pendekatan diplomasi.

Pertemuan FSB Plenary bulan Januari 2012

Pada pertemuan *FSB Plenary* pada bulan Januari 2012, seluruh anggota FSB sepakat untuk mengubah komposisi *Steering Committee* dan menetapkan *High-Level Group on FSB Governance and Resource* yang akan bertanggung jawab untuk memperkuat organisasi dan membina hubungan yang erat dengan BIS. *High-Level Group* ini akan menyampaikan laporan akhir mengenai temuan

dan rekomendasi pada *FSB Plenary Meeting* 2012, yang selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin negara G20 pada KTT G20 di Los Cabos tanggal 18-19 Juni 2012.

Usulan perubahan komposisi *steering committee* ini tercermin dalam penambahan kursi di komite pengarah sesuai dengan hasil *plenary meeting* tersebut, sebagai berikut:

- Penambahan masing-masing 1 kursi untuk wilayah geografis yang belum terwakili yaitu Timur Tengah dan Afrika, sehingga seluruhnya ada tambahan 3 kursi.
- Penambahan satu kursi masing-masing untuk Troika G20 yang saat ini dijabat oleh Perancis, Mexico dan Rusia, sehingga seluruhnya ada tambahan 3 kursi.
- Penambahan masing-masing satu kursi untuk Treasury dari negara-negara yang dipandang mempunyai potensi krisis besar versi penilaian IMF, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan Perancis, sehingga seluruhnya ada tambahan 4 kursi.
- Penambahan satu kursi untuk Spanyol.
- Penambahan satu kursi untuk Singapura dengan alasan sebagai pusat keuangan.
- Keanggotaan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Tabel 3. Komposisi FSB Steering Committee sebelum dan sesudah penambahan

No.	Wilayah	Negara	Jumlah Seat Sebelum	Jumlah Seat Sesudah	Alasan Penambahan Seat
1.	Amerika Utara	Canada	2	2	
		Amerika Serikat	2	3	Systemically Important Country
2.	Amerika Latin	Mexico	1	2	Troika G-20
		Brasil	1	1	
3.	Australia	Australia	1	1	
4.	Asia	China	1	1	
		India	1	1	
		Jepang	1	2	Systemically Important Country
		Korea	1	1	
		Singapore	0	1	Financial Centre
5.	Timur Tengah	Saudi Arabia	0	1	Mewakili Middle East
6.	Eropa	France	1	2	Troika G-20, Systemically Important Country
		Germany	1	2	Systemically Important Country
		Italy	1	1	

		Netherlands	1	1	
		Russia	1	2	Troika G-20
		Spain	0	1	
		Swiss	1	1	
		UK	1	2	Systemically Important Country
7.	Africa	South Africa	0	1	Mewakili Afrika
8.	Lembaga International		7	7	

Sumber: Website FSB tahun 2012 (data diolah penulis)

Tabel 3 menjelaskan penambahan kursi setiap negara anggota pada komite pengarah. Di sini terlihat penambahan kursi di komite pengarah sebagian besar diperuntukkan bagi negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol dan Jepang. Sedangkan alokasi untuk negara emerging dan negara berkembang masih sangat kurang.

KTT G-20 di Los Cabos, Mexico tahun 2012

Pada KTT Los Cabos, Mexico pada tanggal 18-19 Juni 2012, para pemimpin negara G20 telah mengeluarkan rekomendasi dan mengesahkan revisi atas *FSB Charter* untuk menjadikan FSB sebagai “*Enduring organizational footing*” yang memiliki badan hukum tetap, tata kelola yang kuat, dan lebih otonom dalam pendanaan organisasinya serta memiliki kapasitas yang meningkat agar dapat mengkordinasikan pengembangan dan penerapan kebijakan regulasi keuangan global, dengan tidak lupa menjaga hubungan baik dengan BIS yang sudah terjalin selama ini. Para pemimpin negara G20 juga meminta agar pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada tanggal 4-5 November 2012 di Mexico City, FSB telah melaksanakan semua rekomendasi *Leaders* tersebut. Selain itu, Para pemimpin negara G20 juga meminta FSB agar terus melakukan peninjauan ulang atas struktur keanggotaannya agar lebih mencerminkan kesimbangan geografis dan fungsi kelembagaan (G20, 2012).

Posisi Indonesia

Sejak Pertemuan KTT G20 di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2012 sampai dengan pertemuan KTT G20 di Los Cabos, Mexico tahun 2012, Indonesia secara konsisten berkomitmen memperjuangkan penguatan kapasitas, tata kelola dan sumber daya FSB. Komitmen Indonesia ini tercermin dalam setiap intervensi atau kertas posisi yang disiapkan untuk setiap pertemuan G20 yang dihadiri. Berikut disampaikan ringkasan posisi Indonesia terkait isu reformasi proses internal FSB, sebagai berikut.

Posisi pada Pertemuan G20 selama tahun 2011

Posisi Indonesia terkait isu penguatan proses internal FSB telah konsisten disampaikan pada pertemuan-pertemuan G20 selama tahun 2011. Dimulai pada pertemuan *Deputies Meeting G20* di Perancis tanggal 13-14 October 2012, dilanjutkan dengan pertemuan *Finance Ministries and Central Bank Governors Meeting* tanggal 14-15 Oktober 2011, dan sebagai puncaknya pertemuan KTT G20 di Cannes, Perancis pada tanggal 4 November 2011. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, posisi Indonesia adalah:

- Mendukung proses reformasi yang sedang dijalankan oleh FSB, khususnya dalam hal penguatan Kapasitas, Tata Kelola dan Sumber Dayanya.
- Menyetujui dan mendukung kemajuan proses reformasi yang telah dijalankan oleh FSB utamanya yang menyangkut peningkatan sumber pendanaan dan penguatan proses internal/tata kelola FSB. Namun meminta FSB berupaya lebih keras lagi untuk menyelesaikan masalah terkait isu kapasitasnya.
- Meminta FSB lebih transparan dan memperluas struktur keanggotaannya agar lebih mencerminkan keseimbangan baik secara geografis maupun fungsi kelembagaannya. Hal ini akan meningkatkan legitimacy FSB sebagai organisasi internasional yang bertugas menetapkan standar regulasi keuangan global.
- Untuk memperkuat *legitimacy* FSB, Indonesia mendukung inisiatif untuk menerapkan pendekatan *bottom-up* yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan regional consultation. Upaya ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab baik bagi anggota maupun bukan anggota FSB untuk menerapkan regulasi keuangan standar yang telah dihasilkan oleh FSB di negara masing-masing.
- Terus mendukung upaya untuk mereformasi FSB agar lebih *legitimate* dan *autonomy* dalam operasinya, utamanya dengan memperluas keanggotaan di *steering committee* dengan memasukkan unsur eksekutif pemerintah di dalamnya.

Posisi pada Pertemuan G20 selama tahun 2012

Selama tahun 2012, sudah beberapa kali dilaksanakan pertemuan G20, yang diawali dengan pertemuan G20 tingkat *Deputies* tanggal 19-20 Januari 2012, dilanjutkan dengan pertemuan G20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada bulan 25-26 Februari dan 10-20 April 2012, dan terakhir pada pertemuan G20 tingkat kepala negara di Los Cabos pada tanggal 18-19 Juni 2012. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, posisi Indonesia terkait dengan upaya untuk terus memperkuat kapasitas, tata kelola dan sumber daya FSB adalah sebagai berikut.

- Indonesia mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola (*governance*) *Financial Stability Board* (FSB). Namun demikian, upaya penguatan kelembagaan harus tetap memperhatikan struktur keanggotaan yang ada saat ini.
- Penguatan kelembagaan FSB oleh suatu negara dapat dilakukan melalui langkah hukum nasional agar tidak merugikan kepentingan negara lain dan institusi yang saat ini telah menjadi anggota.
- Indonesia terus mendukung upaya untuk mereformasi FSB agar lebih *legitimate* dan *autonomy* dalam operasinya, utamanya dengan memperluas keanggotaan di *steering committee* dengan memasukkan unsur eksekutif pemerintah di dalamnya.
- Perlunya melakukan loby kepada negara-negara anggota G20 lain yang duduk di *steering committee* FSB, agar proposal Indonesia untuk menambah satu kursi tambahan di *Plenary* bagi wakil dari Pemerintah bisa mendapat dukungan dan terealisasi.

Kesimpulan

FSB sebagai organisasi internasional yang baru berdiri dengan mengemban tugas dan mandat yang berat dan kompleks, diantaranya turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas keuangan global dan mencegah krisis baru terjadi, perlu memiliki *legitimacy* yang kuat. Oleh karena itu, reformasi di FSB yang dilakukan melalui penguatan kapasitas, tata kelola dan sumber dayanya merupakan suatu keharusan dan perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Upaya-upaya untuk penguatan proses internal FSB telah dilakukan, namun masih ada celah kelemahan yang perlu segera diselesaikan, diantaranya FSB perlu *mereview* kembali struktur keanggotaannya, baik dari sisi keterwakilan geografis maupun dalam hal keterwakilan fungsi kelembagaannya agar tercipta struktur keanggotaan yang lebih seimbang dan mencerminkan keadilan bagi negara-negara di dunia. Selain itu, upaya untuk menciptakan sumber pembiayaan yang otonom, yang tidak tergantung semata dari BIS, perlu diprioritaskan agar FSB dapat lebih objektif dan transparan dalam menentukan kebijakan dan program kerja globalnya. Penguatan kapasitas kelembagaan juga merupakan isu yang tidak kalah pentingnya, terutama dengan meningkatkan kegiatan *outreach* yang sudah dilakukan selama ini, namun dengan cakupan pesertanya yang diperluas dengan melibatkan negara non-anggota, dan memperhatikan keseimbangan fungsi kelembagaan (pemerintah, bank sentral dan OJK) dari setiap negara yang terlibat.

Daftar Pustaka

Agus Martowardojo & Darmin Nasution, 2011, Surat pernyataan bersama, Jakarta.

Draghi, M. 2009, Remarks, Re-establishment of the FSF as the Financial Stability Board, G20 Summit, London

FSB website, 2012, FSB charter, Basel, dilihat tanggal 27 Juli 2012,
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_090925d.pdf

FSB website, 2012, FSB Steering committee members, Basel, dilihat tanggal 27 Juli 2012,
<http://www.financialstabilityboard.org/about/steeringcommittee.pdf>

FSB website, 2012, Members of the financial stability board, Basel, dilihat tanggal 27 Juli 2012,
<http://www.financialstabilityboard.org/about/plenary.pdf>

FSB website, 2010, FSB reports to G20, Progress since the Washington summit in the implementation of the G20 recommendations for strengthening financial stability, Basel, dilihat tanggal 28 Juli 2012,
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111b.pdf

FSB, 2011, Proposal, Strengthening capacity, governance and resources, Basel

G20, 2010, Leaders declaration, Seoul

G20, 2011, Leaders declaration, Cannes

G20, 2012, Leaders declaration, Los Cabos